

Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Indonesia di Sektor Pertanian

Amin Khadafi

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman

Abstract:

No one can deny that today's world's economy operating in neo-liberalism logic. This logic is so powerful and able to penetrate to every corner of the globe including Indonesia. One of its main postulate is states/world can be benefited if we conduct our economy in free trade. WTO served as a global regime in trade and one of its policy is Agreement on Agriculture (AOA). In brief AOA urge a state not to subsidize domestic agriculture products as it would violate free trade agreement. This article will try to find the impact of AoA in Indonesian agriculture.

Keywords: Liberalization, AoA, Indonesian Agriculture

Abstrak:

Perekonomian dunia berjalan dengan logika neo-liberalisme. Logika ini merupakan logika yang sangat kuat dan mampu untuk menembus sampai pada tiap sudut dunia. Salah satu postulat utamanya adalah bahwa dunia akan lebih makmur apabila perekonomian diatur dengan mekanisme perdagangan bebas. WTO merupakan rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan dan salah satu kebijakan yang dikeluarkannya adalah Agreement on Agriculture (AoA). Secara singkat AoA melarang Negara untuk mensubsidi sektor agrikultur domestiknya karena itu akan melanggar prinsip perdagangan bebas. Artikel ini akan mencoba untuk melihat dampak dari AoA terhadap sektor agrikultur Indonesia.

Kata Kunci : Liberalisasi, AoA, Sektor Agrikultur Indonesia

Pesatnya kemajuan dunia sekarang di beberapa bidang seperti teknologi komunikasi, informasi, komputasi, dan transportasi, telah menciptakan sebuah kondisi di mana sekat-sekat yang di masa lalu membatasi interaksi antar individu, bangsa dan negara kini semakin tereduksi makna signifikansinya. Dengan kemajuan teknologi tersebut telah membuat interaksi antar aktor-aktor internasional semakin intensif dan frekuentif, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat secara drastis dan dengan biaya yang jauh semakin ekonomis.

Implikasinya hampir terasa di segala bidang, seperti: politik, sosial-budaya dan ekonomi baik pada tingkat global maupun lokal. Dalam politik internasional misalnya; tragedi kemanusiaan di satu lokasi bisa dengan cepat dapat memicu

kemarahan dan simpati global di berbagai penjuru dunia. Di bidang budaya terjadi intrusi budaya, perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat. Sedangkan di bidang ekonomi, kemajuan teknologi tersebut menyebabkan barang dan jasa bisa diproduksi di bagian mana pun dari belahan dunia ini asalkan terpenuhi kelayakan teknis dan ekonomisnya, serta bisa dijual kemana pun yang mampu memberikan harga setinggi mungkin.

Globalisasi jelas tidak bisa kita elakan. Suka atau tidak, siap atau tidak, globalisasi sudah merasuki setiap sendi kehidupan sebagian besar umat manusia di seluruh penjuru dunia. Namun masalahnya, globalisasi ternyata tidak selalu membawa manfaat bagi semua orang. Bahkan untuk hal-hal yang memang terbukti menghasilkan manfaat selalu saja terdapat sekelompok orang, bangsa atau negara yang justru mendapat kerugian secara nyata dari globalisasi. Mereka inilah yang termarginalisasikan sebagai korban globalisasi.

Adapun hakikat dari globalisasi itu sebenarnya adalah liberalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional. Perdagangan bebas yang diusung sebagai strategi utama dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan global. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar perdagangan bebas tersebut memang bisa meningkatkan kesejahteraan untuk semua kelompok, misalnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Apakah mungkin jargon perdagangan bebas itu dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perbaikan ekonomi sebuah negara. Atau secara spesifik perdagangan bebas dapat menjamin ketersediaan pangan yang menjadi prioritas utama setiap negara. Atau mungkin malah sebaliknya, perdagangan bebas hanya akan memberikan keuntungan bagi mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, wewenang, uang atau modal-modal lain, dan hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kelompok-kelompok yang lemah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba dijelaskan dalam tulisan singkat ini.

Perdagangan Internasional dalam sektor Pangan

Bahan pangan lebih dari sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pangan juga lebih dari sekedar nutrisi yang harus selalu kita konsumsi setiap hari. Pangan mempunyai kemampuan yang sangat krusial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia—mulai dari kebutuhan budaya, psikologi, hingga kebutuhan sosial manusia. Tegasnya pangan adalah barang yang membuat kita bisa bertahan hidup. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama, kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, dan bahkan sangking pentingnya di dalam piagam PBB pangan diakui sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia.

Meskipun untuk bertahan hidup setiap orang tidak hanya sekedar makan yang bersumber dari bahan pangan seperti roti, gandum, beras, dan lain-lain, akan tetapi panganlah yang memungkinkan orang bisa memulai dan melanjutkan kehidupan. Kekurangan pangan dapat mengakibatkan rasa sakit, kelaparan, kekurangan gizi bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Sedemikian besarnya makna dari sebuah pangan, sehingga pangan dapat menjadi salah satu sumber kekuatan eksistensi sebuah negara.

Mengapa pangan begitu vital bagi sebuah negara? Pertanian boleh jadi lebih dari sekedar aktivitas ekonomi lainnya. Di negara-negara sedang berkembang, sektor pertanian juga memiliki implikasi sosial dan politik. Sektor pertanian terbukti mampu memperkerjakan mayoritas masyarakat. Proses pengaturannya pun bisa menjadi komoditi politik, yakni persaingan antar kelompok pemilik modal besar baik secara internal maupun eksternal.

Pertanian merupakan dasar hidup yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang paling fundamen dan memerankan berbagai macam fungsi yang berbeda-beda. Pertanian bukan hanya persoalan bagaimana cara menghasilkan pangan atau hewan ternak saja, namun juga menyediakan berbagai macam pekerjaan dan mempunyai kapabilitas untuk menggairahkan perekonomian negara terutama di daerah-daerah pedesaan. Aktivitas pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan alam dan lingkungan yang lebih sehat dan indah, di mana para petani memegang peran utama sebagai pengelola tanah dan lingkungan yang ruang lingkungnya cukup luas. Sehingga dengan begitu sudah seharusnya sektor pertanian patut menerima prioritas hak untuk diperlakukan berbeda dari produk industrial dan jasa, terutama dalam hal transaksi perdagangannya maupun dari segi *governance*-nya. Lantas bagaimana perdagangan internasional di sektor pangan itu berlangsung.

Dilihat dari segi waktu perdagangan internasional atas bahan-bahan pangan telah berlangsung selama ratusan yang lalu. Secara historis, perdagangan internasional sektor pangan terjadi dikarenakan satu negara ingin membeli pangan yang tidak diproduksi di dalam negaranya. Perdagangan internasional juga berlangsung lantaran sebuah negara mampu menghasilkan pangan dengan harga yang lebih murah daripada negara lain dengan jumlah yang besar atau dalam bahasa ekonomi sering disebut dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Sekitar abad 19, frekuensi perdagangan internasional di sektor pertanian semakin meningkat, ketika sekian banyak lahan subur di wilayah jajahan seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekspor ke beberapa pusat perekonomian yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Serikat.

Pada mulanya perdagangan internasional tumbuh secara perlahan, namun perkembangannya meningkat pesat lantaran adanya liberalisasi perdagangan yang terlahir dari rahim globalisasi. Kecenderungan yang dimunculkan dari globalisasi tersebut adalah integrasi ekonomi dunia, hal ini membuat perdagangan internasional bergerak lebih cepat. Tak terkecuali sektor pertanian, perdagangan internasional meluas begitu cepat ketimbang peningkatan hasil pangan yang ingin diperdagangkan, yang berdampak pada dimungkinkannya tercipta kelangkaan pangan, kelaparan dan kemiskinan struktural di negara tertentu atau dengan kata lain ada banyak pihak yang akan atau telah dikorbankan dari perdagangan bebas yang sangat tidak adil tersebut.

Liberalisasi perdagangan internasional berarti mereduksi sejumlah hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional untuk barang-barang manufaktur (sejak tahun 1947-1979). Adalah putaran Uruguay pada tahun 1986 menjadi sebuah momentum di mana sektor pertanian dan jasa untuk kali pertama menjadi topik pembicaraan yang diluncurkan dalam negosiasi internasional. Sejak saat itulah liberalisasi perdagangan produk pertanian pun mulai berlangsung di negara-negara sedang berkembang. Hal itu mulai terjadi sejak tahun 1980-an, yang sekaligus juga dilakukan penerapan program penyesuaian struktural (*structural adjustment program-SAP*) yang diprakarsai oleh lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut menekankan bahwa negara-negara sedang berkembang harus menyesuaikan secara struktural perekonomian mereka, sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan pinjaman sejumlah dana/modal untuk pembangunan. Hal ini dilakukan agar dapat mengatasi persoalan neraca pembangunan yang defisit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *structural adjustment program* tersebut adalah bentuk kolonialisme baru dalam bidang ekonomi yang terbukti sangat efektif dapat semakin melemahkan dan mempersulit posisi negara-negara sedang berkembang dalam proses implementasi perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan menjadi inti dari program-program tersebut, lebih lanjut kebijakan ekonomi dunia juga diproyeksikan untuk mendukung terciptanya praktek pasar yang lebih bebas tanpa restriksi kebijakan, yaitu dengan cara meliberalisasi perdagangan internasional sebagai ciri utama dari sebagian besar negara-negara sedang berkembang. Apalagi di dalamnya juga memasukkan perdagangan bahan-bahan pangan. Kebijakan liberalisasi perdagangan di bidang pertanian itu disesuaikan dengan merujuk pada rezim internasional (*Agreement on Agriculture-AoA*) yang sudah disepakati bersama antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang, meskipun terkesan sedikit memaksa.

Seperti apa AoA itu?

Agreement on Agriculture adalah salah satu persetujuan yang dihasilkan oleh pertemuan putaran Uruguay. Persetujuan tersebut banyak didominasi oleh kepentingan negara-negara maju daripada negara-negara sedang berkembang. Kesepakatan AoA mencakup tiga wilayah utama, antara lain; akses pasar, subsidi-subsidi ekspor, dan dukungan domestik pada pertanian (John Madeley, 2005).

Di bawah perjanjian itu, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk hanya memberikan akses minimum untuk produk pertanian yang tidak mereka ekspor dalam jumlah yang signifikan. Sementara, negara-negara maju telah mengizinkan akses minimum sebesar 3 persen bagi konsumsi domestik, dan meningkat menjadi 5 pada tahun 2000, namun untuk negara-negara sedang berkembang, angkanya hanya berkisar 1 persen.

Dalam persetujuan itu juga, negara-negara diwajibkan mereduksi tarif-tarif pangan impor sebesar 36 persen selama lebih kurang 6 tahun (terhitung sejak tahun 1995), dan diwajibkan juga untuk mengganti kebijakan berbagai hambatan non-tarif, seperti mengganti kebijakan pembatasan kuota ke dalam patokan tarif—yang biasa disebut dengan “pentarifan/tarififikasi (*tarriffication*). Untuk negara-negara berkembang, reduksi yang diwajibkan adalah sebesar 24 persen, yang boleh jadi akan berlaku hingga sepuluh tahun sejak persetujuan itu diberlakukan. Lebih jauh, negara-negara anggota juga diwajibkan untuk memangkas subsidi ekspor untuk produk-produk pertanian mereka sebesar 36 persen dalam waktu enam tahun. Lagi-lagi, untuk negara-negara sedang berkembang, reduksi yang diwajibkan adalah sebesar 24 persen dalam jangka waktu sepuluh tahun. Selain itu, subsidi-subsidi pemerintah untuk para petani pun ternyata juga harus direduksi hingga 20 persen. Kendati berbagai komitmen telah dilakukan untuk mereduksi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara sedang berkembang ternyata masih tetap dibebani dengan kewajiban untuk tetap menjalankan dan mematuhi tarififikasi dan pemberian akses minimum.

AoA juga menetapkan bahwa negara-negara tidak boleh menaikkan proteksi mereka atas sektor pangan yang telah diterapkan sebelumnya sejak tahun 1993. Itu artinya, negara-negara industri selama ini telah memberlakukan tingkat proteksi yang sangat tinggi dan sama sekali tidak mengikuti apa yang telah diatur oleh ketentuan proteksi itu. Namun lain halnya ketika persoalan itu terjadi pada negara-negara sedang berkembang yang terbentur oleh ketentuan proteksi tersebut, maka kepada mereka akan langsung dijatuhi sanksi perdagangan karena dianggap tidak mematuhi aturan yang sudah

disepakati bersama. Sehingga dengan begitu praktis negara-negara berkembang tidak dapat menaikkan tingkat proteksinya.

Sejak persetujuan itu ditandatangani pada tahun 1993, Uni Eropa dan Amerika Serikat hanya melakukan sedikit perubahan dalam berbagai kebijakan pertanian mereka, dengan berdalih bahwa mereka telah banyak melakukan pemangkasan seperti yang tercantum dalam kesepakatan Putaran Uruguay tersebut. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi adalah kebalikannya. Terbukti, tingkat total subsidi pertanian yang mereka keluarkan melonjak dari 182 milyar dollar AS pada tahun 1995 (ketika WTO lahir), dan menjadi 280 milyar AS pada tahun 1997, dan melonjak lagi menjadi 362 milyar dollar AS pada tahun 1998 (John Madeley, 2005).

Lantas kemudian, apakah perdagangan internasional di sektor pertanian yang berlangsung di bawah skema AoA tersebut dapat berhasil menciptakan kesejahteraan bagi semua penduduk bumi ini, atau hanya menguntungkan bagi negara-negara maju saja? Atau apakah kita tetap memaksakan persaingan yang tidak kompetitif dalam era perdagangan bebas tersebut?

Mengapa harus memaksakan diri untuk perdagangan bebas?

Alasan utama mengapa liberalisasi perdagangan perlu dilakukan adalah bahwa dengan perdagangan bebas menurut para penganutnya diyakini dapat memberikan peluang bagi pemanfaatan terbaik atas berbagai sumber daya yang ada. Pada alasan pokok itu juga teori keunggulan komparatif terletak. Alasan ini berkeyakinan bahwa seluruh pihak akan mendapat manfaat manakala negara-negara melakukan spesialisasi produk pangan dan jasa secara efisien, yang bisa mereka produksi dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara lain.

Sehingga dengan model seperti itu, secara teori semestinya liberalisasi perdagangan akan mendatangkan berkah kemakmuran yang menguntungkan tidak hanya golongan yang kaya namun juga kaum miskin. Bahkan dikatakan bahwa negara-negara sedang berkembang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang negara-negara yang sama sekali tidak melakukan perdagangan. Namun bagaimana dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya? Apa memang benar negara-negara berkembang diuntungkan oleh perdagangan bebas tersebut atau sebaliknya malah semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan mereka.

Namun kenyataan justru berkata lain. Terdapat sederet bukti yang menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan hanya jeratan yang semakin memberatkan negara-negara berkembang. Ekonomi global justru dikuasai

oleh korporasi besar yang selalu bertujuan untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari daripada sekedar memikirkan kesejahteraan bersama. Perdagangan bebas sama sekali tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan di negara-negara berkembang, justru malah menambah angka kemiskinan.

Serbuan barang-barang import yang sangat murah dalam skala besar berdampak pada jatuhnya harga produk-produk dalam negeri. Termasuk komoditi dan produk pangan, yang artinya sama saja mendatangkan penderitaan bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam.

Lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia?

Pertanian di Indonesia juga bisa disebut sebagai korban globalisasi atau lebih spesifik liberalisasi perdagangan. Tentu saja sudah dapat dipastikan siapa yang paling dikorbankan dalam hal ini, petani-petani Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi liberal pemerintah yang berkuasa.

Perdagangan bebas atas bahan-bahan pangan berdampak pada tingginya angka import Indonesia di sektor pertanian. Serangan komoditas dan produk import dengan harga yang sangat murah seperti: sayur-sayur organik, buah-buahan segar, beras, gula rafinasi, dan produk-produk olahan lainnya menjadikan tidak lakunya produk dalam negeri. Masyarakat kita tentu saja lebih cenderung suka mengkonsumsi produk-produk yang lebih murah dan dianggap lebih higienis, yang mana pilihan itu ada pada produk-produk import. Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi petani-petani kita, di saat mereka tengah berjuang untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas pangan meskipun tanpa dukungan yang maksimal dari pemerintah, kini beban mereka bertambah dengan dipaksa untuk bersaing dengan produk-produk asing. Apa yang salah dari semua ini?

Dari observasi lapangan yang pernah dilakukan di dua tempat, yakni: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dan PT. Madubaru (Pabrik Gula Madukismo) telah didapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan persoalan dampak liberalisasi perdagangan. Hampir sama seperti yang terjadi di negara-negara sedang berkembang lainnya, petani-petani Indonesia sangat memprihatinkan kondisi perekonomiannya, mereka lebih sering menjadi korban-korban globalisasi daripada menikmati manisnya globalisasi.

Di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, misalnya terdapat berbagai macam problematika pertanian yang mungkin juga terjadi di daerah-daerah wilayah Indonesia lainnya. Formula terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut

sementara ini masih belum ditemukan. Karena mengurus pangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain faktor ekonomis, ada juga faktor-faktor non-ekonomis seperti persoalan sosial dan politik selalu membayangi dan menyertai proses *governance*-nya.

Paling tidak terdapat lima tantangan yang dihadapi oleh daerah ini terkait dengan komoditas ekspornya yang dilihat dari perspektif ekonomi: *Pertama*, jenis komoditas atau produk yang diperdagangkan masih terbatas. Sehingga dengan komoditas dan produk pangan yang terbatas tersebut sangat sulit bagi pertanian kita untuk bersaing dalam perdagangan internasional, bahkan pasar lokal sekalipun. *Kedua*, masalah volume komoditas dan produk pangan juga menjadi faktor krusial yang menjadikan komoditas dan produk pangan kita mempunyai jumlah yang sangat kecil dan terbatas, sehingga modal atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditas dan produk pangan tertentu jauh lebih besar daripada hasilnya. Hal ini tentu saja dapat mengurangi pendapatan para petani. *Ketiga*, standar mutu merupakan persoalan selanjutnya. Menurut banyak pakar teknologi pertanian di Indonesia yang menenggarai bahwa produk pertanian yang dihasilkan dan ditawarkan oleh produsen lokal kurang memiliki keunggulan spesifik, sehingga mutu komoditas atau produk pangan yang dihasilkan rendah dan kondisi ini sudah barang tentu dapat mengakibatkan produsen atau petani lokal kurang mampu bersaing dengan produsen pertanian multinasional atau korporasi besar. *Keempat*, jaringan pasar (*market network*). Jaringan pasar petani dan produsen pangan lokal kita tidak terlalu luas dan seringkali dihantui oleh ketakutan oleh rendahnya mutu produk pangan kita, hal ini diperparah dengan kondisi pasar yang sangat kompetitif dan tidak berpihak, di mana hanya pihak-pihak kuat saja yang mampu bersaing. Apalagi strategi pemasaran kita harus diakui masih terlalu lemah. Pemasaran produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan semestinya memerlukan strategi khusus agar dapat dikenal dan dipilih masyarakat. Saat ini dengan berkembangnya produk industri pertanian di berbagai negara mempunyai dampak yang serius bagi pasar lokal, maka produsen lokal juga harus mempunyai jaringan pasar yang luas agar bisa menembus pasar internasional. *Kelima*, faktor kelayakan harga. Harga komoditas dan produk pangan yang ditawarkan dipasar terkadang jauh lebih rendah daripada modal yang digunakan untuk menghasilkan komoditas atau produk itu sendiri sehingga petani acap kali mengalami kerugian.

Adapun hambatan yang secara khusus dihadapi oleh Dinas Pertanian Bantul di daerahnya, antara lain; para petani sulit untuk diarahkan menerapkan kuota tanam, petani juga belum terbiasa untuk beraktivitas dalam sebuah tim kerja. Sebaliknya petani-petani di daerah Kabupaten Bantul sudah terbiasa dengan ritme dan pola bekerja seadanya dan tidak menerapkan standar mutu yang baik. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada produktivitas pertanian

daerah ini. Kondisi serupa mungkin juga masih ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Lain halnya dengan yang dialami PT. Madubaru PG-PS Madukismo. Pabrik gula yang sahamnya dikuasai sebanyak 65 persen oleh Ngarso dalem Kraton Yogyakarta dan sebanyak 35 persen dikuasai oleh PT. Rajawali Nusantara. Sebagai salah satu pabrik gula besar dengan total produksi sekitar 40.000 ton/tahun seringkali dipusingkan oleh faktor-faktor non-ekonomis dalam pengelolaan gula nasional. Dalam banyak kesempatan pabrik ini berupaya untuk terus memberikan yang terbaik buat para petani tebu di sekitar daerah Kabupaten Bantul, yakni dengan cara terus mengawal stabilitas harga gula di pasar domestik. Usaha tersebut memang tidak mudah karena banyak sekali pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam *governance* gula ini.

Menurut direktur PT. Madukismo bapak Ir. Rahmat Edi Cahyono, M.Si bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan harga gula di pasaran menurun, antara lain; masuknya gula rafinasi, sisa gula (*import white sugar*) tahun sebelumnya masih ada, masuknya *raw sugar*. Gula rafinasi yang membanjiri pasar lokal mengakibatkan harga gula lokal pun menjadi terganggu. Gula rafinasi ini didatangkan secara berlebihan oleh importir untuk memenuhi kebutuhan domestik yang memang tinggi yakni sekitar 3,5 juta ton/tahun. Sedangkan total produksi gula hanya sekitar 2,8-3 ton/tahun, sehingga Indonesia memang harus mengimpor kekurangan produksi itu, namun masalahnya ada beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan ini, dengan cara melakukan impor secara berlebihan sehingga mereka bisa mempunyai stok gula yang banyak, yang sewaktu-waktu bisa digelontorkan ke pasar dengan harga yang tinggi.

Menurut beliau mengelola gula memang membutuhkan nasionalisme yang tinggi agar pasar kita tidak diserang oleh gula-gula import yang merugikan keberadaan gula lokal. Negara ini harus diselamatkan dari pihak-pihak yang berorientasi untuk memperkaya diri dengan mengambil keuntungan dari pengelolaan gula nasional. Dengan import yang berlebihan dapat merusak harga gula nasional.

Informasi di atas semakin mempertegas bahwa perdagangan bebas terbukti tidak selalu mendatangkan hal-hal positif bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Telah sering ditemukan banyak bukti bahwa liberalisasi perdagangan justru menyebabkan peningkatan import pangan dalam jumlah yang sangat besar ke negara-negara berkembang, sehingga berdampak sangat buruk terhadap penghidupan petani lokal. Bahkan terdapat sejumlah penelitian yang menemukan fakta bahwa di bawah kesepakatan AoA, sebagian besar negara yang telah mengurangi bantuan domestik untuk para petani mengalami

penurunan hasil produksi pangan mereka secara nasional. Sehingga mereka tidak mampu mendongkrak angka ekspor, sebaliknya pasar lokal semakin dipenuhi oleh produk-produk import. Hal serupa juga terjadi di negeri kita tercinta Indonesia.

Liberalisasi perdagangan yang digembar-gemborkan oleh para penganutnya, jelas terbukti sering kali tidak berpihak pada masyarakat kecil dan sebaliknya hanya mengorbankan mereka. Para petani padi di Indonesia, contohnya, sudah dan masih terus menjadi korban globalisasi hingga saat ini. Pada tahun 1998, atas tekanan IMF melalui *letter of intent* (LoI) bulan Januari 1998, pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi beras. Dalam perjanjian itu pemerintah Indonesia dipaksa untuk harus menurunkan tarif import produk pertanian pangan menjadi nol persen dan untuk non-pangan lima persen. Dampak dari kebijakan pemerintah itu tentu saja sangat merugikan para petani padi Indonesia. Harga beras lokal kita rusak, para petani pun menjerit karena mereka tidak memperoleh hasil yang memuaskan dari panen mereka. Para petani padi pun berfikir keras untuk menanam padi kembali, karena harga gabah terus mengalami tekanan. Puncaknya terjadi pada musim panen tahun 2000, ketika harga gabah kering giling pada tingkat petani anjlok menjadi Rp. 700 per kilogram. padahal biaya sarana produksi padi dan tenaga kerjanya sudah mencapai Rp. 800 per kilogram. Sebaliknya import beras menjadi lahan perburuan rente (*rent seeker*) ekonomi besar-besaran para konglomerat dan elite politik pada saat itu. Kondisi seperti ini sekali lagi menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan hanya akan memberikan keuntungan lebih kepada mereka-mereka yang memiliki modal dan kekuasaan.

Penutup

Sesungguhnya, ketahanan pangan dapat semakin kuat dan kokoh bila ditopang oleh perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*). Dalam kerangka perdagangan yang berkeadilan itu, para produsen yang sesungguhnya akan mendapat penghasilan dalam jumlah yang lebih tinggi daripada ketika mereka berada dalam sistem perdagangan bebas. Dengan penghasilan yang layak tersebut tentu saja bisa memberi mereka peluang yang lebih besar untuk menciptakan ketahanan pangan.

Oleh sebab itu, dalam catatan penutup ini ingin ditegaskan bahwa kita seharusnya bisa melihat globalisasi seperti pesta olahraga olimpiade tingkat dunia. Dalam olimpiade, biasanya para atlet yang akan bertanding sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan rankingnya. Ada syarat minimal yang harus dipenuhi untuk bisa ikut dalam kompetisi tertentu. Dengan demikian, pertandingan yang dilakukan antar atlet relatif lebih seimbang. Lalu, jika ada

atlet yang cedera, meskipun rankingnya relatif tinggi, dia tidak akan dipaksa bertanding atau bertarung supaya cederanya tidak semakin bertambah parah.

Namun apa yang kita lihat saat ini dari dinamika globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional justru mengindikasikan ketidakseimbangan antar aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Bagaimana mungkin negara kecil atau negara berkembang harus bersaing dengan negara-negara maju yang notabene jauh lebih kuat.

Bagi Indonesia sendiri, yang terpenting adalah menyadari bahwa dalam berbagai bidang, kelas kita memang masih jauh dari kata memadai untuk terjun bertanding ke dalam gelanggang pertarungan keras di olimpiade globaliasi tersebut, khususnya bidang ekonomi Indonesia masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dari negara-negara yang berani mengatakan tidak pada formula *Washington Consensus* sebagai dasar kebijakan ekonomi pemerintah. Karena hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil kelompok elite negeri ini, dan mengorbankan sebagian besar kelompok masyarakat kecil seperti petani, buruh dan nelayan kita.

Indonesia tidak perlu gagah-gagahan untuk menjadi pro-globalisasi tanpa mengukur kekuatan dan kemampuan sendiri. Semestinya Indonesia perlu melakukan konsolidasi internal dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin sehingga Indonesia tidak menjadi korban globalisasi. Serta lebih memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (khususnya petani) agar dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan di kemudian hari.

Referensi:

- Madeley, John. 2005. *Loba Keranjang Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*. Yogyakarta: CPRS.
- O'Brien, Robert & Marc Williams. 2007. *Global Political Economy: Evolution and Dynamics*. New York: Palgrave MacMillan.
- Ravenhill, John. 2008. *Global Political Economy*. New York: Oxford University Press.
- Stiglitz, J.E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin.
- Stiglitz, J.E. 2006. *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Kompas, Tanggal 12 Mei 2010
- Kompas, Tanggal 20 Mei 2010
- Joglosemar, Tanggal 24 Mei 2010
- Ekbis, Tanggal 22 Mei 2010